

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PENGEMBANGAN
PARIWISATA DI PANTAI PANDANSIMO
(Studi Mengenai Peran Perempuan di Pantai Pandansimo,
Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul,
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)**

Oleh :
E. Yuningtyas Setyawati¹⁾

This research was aimed to identify the involvement and role of women in economic, social and cultural activities in the coastal tourism destinations in Pandansimo, and to know the opportunities and challenges in empowering them. The problem of research in this study is whether the goal of tourism activities to improve the social, economic, and cultural welfare of the local communities, especially the women, has been reached.

This study made use of qualitative-descriptive approach using the 'key informants' from each of the 'stakeholder' groups. The method of in-depth interviews and field observations were employed. Qualitative-descriptive study is a preliminary study using descriptive method. It is discussed by making use of theories or concepts and integrated with views and opinions of the key people involved in the tourism activities in Pandansimo.

The results of the study show that the women in Pandansimo have been involved in tourism activities. Nonetheless, their involvement is still not maximized since the involvement of women in tourism is still very limited, that is only for personal and family interest. They usually have no access at all to the opportunities for tourism development. In addition, they do not have sufficient knowledge in the field. Their income usually only functions as additional income in the family and they think that by having their own income they feel they have things that are not much different from the husband/partner in making decisions in the family. Women's involvement in tourism activities can also be culturally beneficial. For example, by engaging in tourism activities, female workers will begin to recognize the work of art and culture and cultural activities that support tourism, arts and culture as an integral part of tourism. It is more advantageous in the context of tourism in the Area Pandansimo because the opportunity to become more involved in tourism is wide open because the men who usually become the dominant group do not mind to have their wives work. This is apparent from the statements of the respondents that their husbands do not prohibit them when they want to continue working in the area of Pandansimo. This means that the chances are very great.

Considering that the role and status of women in the tourism activities on Pandansimo Beach is not yet optimal, it is recommended that the women need to get more decision-making space and a wider self-actualization in setting every strategy and tourism implementation in Pandansimo. This is necessary in order to achieve the desired gender equality and further to optimize the roles of men and women of local communities. In addition, it is also necessary to develop the area to be more attractive and to promote the local culture and traditions so that the local people can participate better and enjoy widespread welfare around Pandansimo Beach.

1. E. Yuningtyas Setyawati adalah Dosen Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Pendahuluan

Pariwisata merupakan salah satu produk yang dapat memberikan kontribusi dalam perekonomian bagi pembangunan daerah khususnya dan pembangunan Indonesia pada umumnya. Sektor pariwisata di Indonesia dewasa ini tumbuh dan berkembang menjadi suatu industri yang penting dan dapat diandalkan untuk menambah devisa negara. Disebut sebagai suatu industri karena aktivitas rekreasi (pariwisata) tersebut secara ekonomi telah menciptakan permintaan yang memerlukan pasar bagi produk barang dan jasa pelayanan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan yang masing-masing terpisah sama sekali, namun saling melengkapi.

Pengembangan objek wisata beserta fasilitas pendukungnya tentunya akan membawa pengaruh bagi penduduknya, khususnya mereka yang berada di sekitar lokasi. Hal ini tampak terutama di negara-negara sedang berkembang yang tentunya masyarakatnya masih memiliki pendapatan per kapita yang cukup rendah. Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa pembangunan pariwisata lebih banyak menghasilkan kerugian dalam hal sosial dan kebudayaan ketimbang pembangunan di sektor yang lainnya (de Kadt, 1979:ix). Pendapat semacam ini muncul akibat banyak pemerintah di negara-negara sedang berkembang mengabaikan masyarakat setempat (lokal) dalam membangun objek-objek wisata, bahkan tidak jarang mereka terpaksa pindah ke tempat lain. Pembangunan pariwisata juga sering dituduh sebagai penyebab perubahan kebudayaan masyarakat lokal. Banyak

tradisi dan kesenian yang semula terintegrasi ke dalam agama setempat lalu lama-kelamaan berubah dan dikemas dalam hitungan ekonomi.

Menurut Sazanami (1993), pariwisata dan kebudayaan adalah mitra yang penting dan masing-masing saling memperkuat. Namun, Sazanami juga menambahkan pembangunan pariwisata yang cepat akan dapat meningkatkan konsumsi dan melemahkan sumber daya lokal, seperti alam dan warisan budaya. Bagi bangsa Indonesia, pembangunan pariwisata dengan menyertakan masyarakat lokal bukan saja menjadi keharusan seperti yang tertuang dalam GBHN, namun juga sesuai dengan upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.

Namun demikian, masih banyak aspek lain, terutama sosial dan kebudayaan, yang harus dicermati dalam kepariwisataan. Oleh karena itu, dalam mengembangkan pariwisata hendaknya perlu memperhatikan beberapa hal, di antaranya adalah (1) peran serta masyarakat lokal dalam pengembangan objek pariwisata dan (2) dampak yang ditimbulkan atau dirasakan oleh masyarakat di sekitar lokasi pariwisata, baik yang positif maupun yang negatif. Pariwisata sebagai suatu konsep muncul ketika aktivitas perjalanan manusia ke daerah-daerah lain untuk tujuan rekreasi tersebut menjadi kajian ilmu pengetahuan. Menentukan satu konsep pariwisata yang tepat dan universal tampaknya tidaklah mudah. Hal ini tidak lain karena banyaknya bidang atau sektor yang terlibat di dalam pariwisata, misalnya sektor ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan/ politik, dan psikologi.

Kontribusi sektor pariwisata secara ekonomi dapat dilihat secara konkrit, tetapi selain aspek ekonomi yang dicanangkan dalam pembangunan pariwisata, aspek sosial pun perlu memperoleh porsi perhatian dalam pengembangan pariwisata tersebut. Oleh karena itu, pengembangan sektor wisata perlu mengkaitkan antara aspek sosial dan ekonomi secara terpadu sebab kedua aspek tersebut merupakan inti pengembangan pariwisata itu sendiri. Dengan demikian, tujuan akhir pengembangan pariwisata adalah untuk dinikmati, tidak hanya oleh para wisatawan, tetapi juga oleh masyarakat setempat.

Oleh karena itu, munculnya pariwisata yang ada di suatu daerah perlu mempertimbangkan peluang kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Demikian juga perkembangan pariwisata di Kabupaten Bantul juga harus mempertimbangkan hal tersebut. Secara teoritis sektor pariwisata akan banyak memunculkan kesempatan kerja yang dapat dimanfaatkan oleh kaum perempuan. Dengan semakin banyaknya kaum perempuan yang memasuki wilayah kerja kaum laki-laki, tentunya akan membawa konsekuensi masalah *gender* yang semakin menarik. Akan tetapi fenomena ini terus berdampak pada upaya-upaya peningkatan peran perempuan dalam berbagai sektor. Beberapa tahun terakhir ini, analisis persamaan *gender* di sektor pariwisata secara umum sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penelitian pariwisata (Lihat Kinnaird & Hall, 1994: edisi khusus *Annals of Tourism Research* 22(2)), begitu juga pariwisata dalam kaitannya sebagai alat

untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal (Barkin, 1999; Linberg, 2002). Namun dampak negatif pariwisata dan wisata alternatif lainnya serta kemungkinan potensi pariwisata dalam pengembangan masyarakat daerah yang terbelakang masih sangat kurang (Scheyvens, 2000). Dalam konteks Kabupaten Bantul umumnya dan Kawasan Pandansimo pada khususnya, beberapa penelitian potensi pariwisata dan model pemberdayaan dan peningkatan peran perempuan belumlah banyak dilakukan. Demikian juga, penelitian yang mengkhususkan pada pemberdayaan perempuan di bidang pariwisata utamanya untuk meningkatkan status sosial, budaya dan ekonomi secara terpadu belum pernah dilakukan di lingkungan Kawasan Pandansimo.

Di samping itu, di masa reformasi saat ini, mengidentifikasi peran perempuan di sektor pariwisata sebagai salah satu usaha pemberdayaan perempuan akan sangat bermanfaat untuk pembinaan pariwisata di Kabupaten Bantul di masa yang akan datang, karena berberapa alasan, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan kepastian bahwa pembangunan pariwisata yang ditawarkan harus melihat proses. Keputusan kebijakan tentang pengembangan pariwisata masa depan merupakan cerminan dan peran dari pendapat para pelaku pariwisata, termasuk didalamnya perempuan. Kelompok ini benar-benar mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya atas kebijakan pengembangan pariwisata di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Bantul pada

khususnya. Pola pembangunan ini disebut dengan pola pemberdayaan masyarakat.

2. Untuk memberikan jaminan hak-hak perempuan terakomodasi secara baik dalam setiap kepentingan pariwisata.
3. Untuk meyakinkan terlaksananya manajemen yang baik terhadap aset-aset pariwisata di Indonesia, seperti misalnya sumber daya alam, karena pariwisata memang didasarkan pada keberadaan sumber daya alam tersebut.
4. Untuk meyakinkan bahwa pariwisata memberikan keuntungan secara ekonomis, sosial, dan budaya terhadap semua pelaku pariwisata (*stakeholders*) termasuk di dalamnya adalah perempuan.

Konsep pemberdayaan mencakup pengertian *community development* (pembangunan masyarakat) dan *community based development* (pembangunan yang bertumpu pada masyarakat). Pada tahap selanjutnya muncul istilah *community driven development* (pembangunan yang digerakkan oleh masyarakat). Pemberdayaan di dalam proses pembangunan harus memuat dua strategi dasar yang memadukan dua tujuan sekaligus, yaitu pertumbuhan dan pemerataan. Dalam arus kontekstual, arah pemberdayaan hanya efektif apabila ditopang oleh tiga hal, yaitu:

1. Pemihakan kepada yang lemah dan pemberdayaan mereka;
2. Pemanjapan otonomi dan pen-delegasian pemenang dalam pengelolaan hidup; dan

3. Moderisasi melalui penajaman dan pemanjapan arah perubahan setruktur sosial ekonomi dan budaya yang bersumber pada peran masyarakat lokal.

Zeppel (1999) secara lebih luas mendefinisikan pariwisata sebagai suatu kegiatan wisata yang berdasar pada sumber daya alam yang berkelanjutan dengan memasukkan juga unsur-unsur dinamika sosial dan budaya, di mana wisatawan berinteraksi dengan masyarakat lokal di taman nasional dan daerah-daerah yang belum banyak dikembangkan. Padahal menurut Sri Agus (1999), kegiatan wisata budaya di Indonesia kebanyakan masih berjalan apa adanya karena dipengaruhi oleh rendahnya sumber daya manusia dalam merencanakan suatu paket wisata budaya. Hal ini lebih dipersulit dengan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pengaruh negatif pariwisata bagi lingkungannya. Akibatnya, interaksi antara wisatawan dan masyarakat lokal bisa memberikan dampak sosial dan budaya baik yang positif maupun negatif pada tataran individu, keluarga, serta masyarakat (Zeppel,1999). Berdasarkan lingkup penelitian ini, beberapa tinjauan pustaka yang erat hubungannya dengan pemanfaatan pariwisata untuk pemberdayaan masyarakat lokal—dalam konteks ini adalah perempuan dari sudut sosial, budaya, dan ekonomi—akan dibahas secara singkat untuk memberikan gambaran secara umum sudut pembahasan masalah.

Scheyvens (2000:236) menyatakan bahwa ada empat dimensi yang perlu dibahas untuk menentukan

apakah perempuan sudah diberdayakan dalam kegiatan pariwisata, di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Keempat dimensi tersebut meliputi pemberdayaan dilihat dari sudut ekonomi, sosial, psikologi, serta politik (Scheyvens, 2000). Walaupun selama ini pembicaraan mengenai pemberdayaan masyarakat lokal terhadap kegiatan pariwisata lebih banyak difokuskan pada masalah ekonomi, dalam kenyataannya pembangunan pariwisata itu merupakan kegiatan yang multidimensional, tidak hanya semata masalah ekonomi saja.

Keunggulan pariwisata dalam hal perolehan devisa negara, menyediakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat tidak perlu diragukan lagi. Linberg (1999) menyatakan bahwa pariwisata mempunyai peran yang sangat besar dalam hal *'generating economic benefits'* karena pariwisata ikut membantu penciptaan lapangan kerja di daerah terpencil yang secara ekonomis belum mendatangkan keuntungan baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Meskipun kadang-kadang skalanya sangat kecil, tetap saja akan memberikan pengaruh yang cukup besar baik bagi individu maupun masyarakat. Hal tersebut telah pula mengakibatkan persaingan antardaerah, antarpropinsi, dan antarnegara nampak semakin tinggi. Lebih lanjut Linberg (1999) menyatakan bahwa studi tentang pariwisata di Australia telah membuktikan adanya pengaruh positif dari sudut ekonomi, meskipun tingkat keuntungannya sangat bervariasi antara satu tempat dengan tempat lainnya. Jika membicarakan masalah pemberdayaan ekonomi dari

sudut pandang pariwisata, perlu kiranya dibicarakan sektor formal dan informal serta kesempatan berusaha yang tersedia, karena, kegiatan wisata yang sifatnya musiman memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi masyarakat lokal. Terlebih lagi, sering terjadi ketidaksamaan pendapatan bagi orang-perorang yang dapat menimbulkan permasalahan (Wilkinson & Pratiwi, 1995). Scheyvens (2000) berpendapat bahwa, dalam hal pekerjaan formal, biasanya perempuan lokal tidak sering diikutsertakan dalam hal pembangunan fasilitas akomodasi ataupun Daerah Tujuan Wisata (DTW).

Di samping itu, kadang-kadang karena faktor norma sosial yang tidak memperbolehkan perempuan bekerja dalam sektor tertentu sangat berperan dalam lemahnya pemberdayaan perempuan di sektor pariwisata. Dengan begitu kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi sudah terhambat oleh norma sosial yang berlaku di daerah tersebut.

Pemberdayaan secara sosial didefinisikan sebagai suatu situasi di mana rasa kesatuan dan integritas sebuah kelompok masyarakat menjadi semakin kuat (Scheyvens, 2000). Sedangkan Rapaport (1987) menyatakan bahwa pemberdayaan sebagai suatu proses; suatu mekanisme; dalam hal ini individu, organisasi, dan masyarakatnya menjadi ahli akan masalah yang mereka hadapi. Fungsi pariwisata sebagai faktor yang menunjang pemberdayaan sosial sangatlah penting, karena dengan dibangunnya *'community-based tourism'* akan memberikan pengaruh dinamika sosial yang cukup kuat bagi

kelompok masyarakat tersebut. Akibatnya, anggota masyarakat akan merasa diikutsertakan dalam kegiatan pariwisata yang berhasil. Pemberdayaan sosial yang bisa dilihat secara langsung dan tidak langsung dengan dilakukannya kegiatan pariwisata adalah semakin terbukanya kesempatan masyarakat setempat terhadap akses umum, seperti misalnya air bersih, jalan yang semakin baik, serta klinik-klinik kesehatan. Sedangkan dari perspektif budaya, Zeppel (1999) berpendapat bahwa pariwisata yang dikelola dengan baik juga memungkinkan untuk digunakan sebagai suatu sarana untuk mempertahankan keberadaan budaya asli masyarakat setempat.

Pemberdayaan sosial yang memadai terhadap masyarakat setempat memungkinkan mereka mempunyai kekuatan politis terhadap pembangunan fasilitas umum atau pembangunan DTW pariwisata. Lebih jauh lagi mereka akan diikutsertakan dalam proses monitoring dan evaluasi terhadap suatu kegiatan serta semakin kuatnya lobi kelompok perempuan terhadap control sumber daya alam dan budaya.

Penelitian mengenai keterlibatan kaum perempuan yang telah dilakukan merujuk pada hal yang senada, yaitu meskipun mereka telah dilibatkan secara aktif, posisi mereka selalu ada di bawah. Seperti yang dikatakan oleh Hall (1992:64) bahwa "*...the most prominent tourist-related issues tend to be associated with the exploitation of women,...*". Di samping itu, di beberapa negara berkembang hal yang sama juga terjadi, seperti misalnya di Filipina di mana rekrutmen untuk para pekerja perempuan biasanya ditentukan oleh

kaum laki-laki dan pekerja perempuan ditempatkan pada posisi yang tidak menguntungkan (*lower position*) (Chant, 1997). Beberapa ciri-ciri khusus mengenai pekerja perempuan di bidang pariwisata di antaranya adalah: (1) kaum perempuan jarang mendapatkan promosi pekerjaan sampai pada tingkatan supervisor dan manajemen; (2) kaum perempuan jarang sekali bisa mengembangkan karir di bidang pariwisata ; dan (3) mereka jarang mendapatkan kesempatan untuk berkembang secara professional sebagaimana partner mereka yang bisa mencapai posisi pekerjaan yang lebih tinggi.

Berangkat dari fenomena tersebut, kegiatan penelitian ini dirancang dengan maksud utamanya untuk menjembatani *gap* atau kesenjangan informasi yang terjadi di sektor pariwisata, utamanya mengenai pemberdayaan perempuan, karena perempuan memang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan pariwisata meski untuk konteks Indonesia peran perempuan dalam kegiatan pariwisata masih berkisar pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan domestik, seperti misalnya memasak (Satyawan & Utami, 2000). Sedangkan penyerapan tenaga kerja di bidang lain yang menuntut ketrampilan khusus masih didominasi oleh laki-laki. Oleh karena itulah, kegiatan penelitian ini diadakan agar bisa diketahui apakah kegiatan pariwisata yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal baik secara sosial, ekonomi, dan budaya di Kawasan Pandansimo dan sekitarnya sudah tercapai.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengetahui beberapa hal seperti tertulis di bawah ini:

- a. Mengidentifikasi keterlibatan dan peran perempuan pada sektor pariwisata di Pantai Pandansimo, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta.
- b. Mengidentifikasi peran dan status perempuan dalam aspek ekonomi dalam kegiatan pariwisata di Pantai Pandansimo, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta.
- c. Mengidentifikasi peran dan status perempuan dalam aspek sosial dan budaya dalam kegiatan pariwisata di Pantai Pandansimo, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta.
- d. Mengetahui peluang dan tantangan yang dihadapi dalam melakukan upaya pemberdayaan perempuan di sektor pariwisata Pantai Pandansimo, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta.

2. Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat yang ingin dicapai dengan melakukan penelitian ini. Kedua manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis hasil dari penelitian ini dapat dipergunakan untuk menjelaskan dan menambah informasi yang berkaitan dengan pembangunan pariwisata, *gender*

dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan pula dapat dipergunakan untuk acuan peneliti lain yang menekuni penelitian sejenis.

- b. Secara praktis dapat ditentukan arah kebijakan sektor pariwisata yang berbasis pada kesetaraan yang berbasis pada kesetaraan *gender* sehingga laki-laki dan perempuan dapat dilibatkan secara aktif dan kebijakan yang diterapkan bersifat menguntungkan, baik bagi laki-laki maupun perempuan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabatnya. Serta diharapkan agar kebijakan sektor pariwisata memperhatikan pengembangan aspek sosial dan budaya selain kebutuhan ekonomi semata.

Tinjauan Pustaka

1. Pembangunan Pariwisata dan Pendayagunaan Sumber Daya Masyarakat

Dari sudut pandang sosiologi, kegiatan pariwisata sekurangnya mencakup tiga dimensi interaksi, yaitu kultural, politik, dan bisnis (Usman, 1998). Dalam dimensi interaksi kultural, kegiatan pariwisata menjadi ajang akulturasi budaya berbagai macam etnis dan bangsa. Melalui pariwisata, kebudayaan masyarakat tradisional agraris sedemikian rupa bertemu dan berpadu dengan kebudayaan masyarakat modern industrial. Kebudayaan-kebudayaan itu saling menyapa, saling bersentuhan, saling beradaptasi, dan tidak jarang

kemudian menciptakan produk-produk budaya baru.

Sementara itu, dalam interaksi politik, kegiatan pariwisata dapat menciptakan dua kemungkinan yang ekstrem, yakni 1) persahabatan antaretnis dan antarbangsa serta 2) bentuk-bentuk penindasan, eksploitasi, atau neokolonialisme. Di satu pihak, melalui pariwisata, tiap-tiap etnis dan bangsa dapat mengetahui atau mengenal tabiat, kemauan, dan kepentingan etnis serta juga kemungkinan bangsa lain. Pengetahuan semacam itu dapat memudahkan pembinaan persahabatan atau memupuk rasa satu sepenanggungan. Akan tetapi, di lain pihak, melalui pariwisata ini juga dapat tercipta bentuk ketergantungan suatu etnis atau bangsa kepada etnis atau bangsa lain, misalnya meningkatnya ketergantungan pendapatan negara sedang berkembang kepada wisatawan dari negara maju.

Sedangkan dalam dimensi interaksi bisnis, kegiatan pariwisata terlihat menawarkan bertemunya unit-unit usaha yang menyajikan bermacam-macam keperluan wisatawan. Bentuk yang disajikan oleh unit-unit usaha ini dapat berupa barang ataupun jasa. Adapun rentangannya dapat berskala lokal, nasional, ataupun internasional.

Tanpa mengabaikan pentingnya dimensi interaksi kultural dan interaksi politik, maka interaksi bisnis dalam aktivitas sektor wisata mendapat porsi yang lebih tinggi. Hal ini terjadi karena pertimbangan bahwa pembangunan industri kita sampai sekarang masih ditujukan untuk kepentingan ekonomi, seperti menambah kesempatan kerja, meningkatkan devisa negara dan

pendapatan per kapita, serta mengalihkan ketergantungan pada minyak bumi.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, terutama setelah tahun 1991 dicanangkan sebagai tahun kunjungan wisata, kiprah pemerintah dalam menggarap masalah pariwisata benar-benar menggembirakan. Pemerintah telah mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk membangun, memperbaiki, dan mengembangkan berbagai macam infrastruktur di berbagai daerah tujuan wisata. Di samping itu, pemerintah juga telah membenahi perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan paspor dan visa. Tidak ketinggalan pula, pemerintah juga telah melakukan pembenahan peraturan-peraturan tentang usaha kepariwisataan, seperti perhotelan, restoran, biro perjalanan, pramuwisata, perlindungan lingkungan, kelestarian alam, dan peninggalan sejarah. Pendek kata, pemerintah telah merencanakan dan mengimplementasikan bermacam-macam program dalam rangka memberi stimulan kepada berbagai kalangan untuk berpartisipasi aktif demi perkembangan sektor pariwisata di Indonesia.

Namun ada satu persoalan yang perlu kita cermati, yaitu instansi-instansi pemerintah di tingkat lokal (provinsi dan kabupaten) belum maksimal menciptakan interaksi horizontal dalam menggarap industri pariwisata. Dengan demikian, pembangunan industri pariwisata diserahkan sepenuhnya kepada instansi-instansi di bawah Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi. Sebagai akibat dari strategi pembangunan kita yang masih

bersifat sentralistis, instansi-instansi di tingkat lokal lebih banyak mengembangkan jalur interaksi vertikal dengan atasannya. Instansi-instansi tersebut tidak mudah membangun inisiatif perencanaan dan implementasi pembangunan karena setiap tindakan hampir tidak pernah berjalan mulus tanpa dukungan dan *lampu hijau* dari atasannya.

Membiarkan struktur interaksi semacam ini tentu tidak menguntungkan dan sangat sulit mengantisipasi perkembangan industri pariwisata. Padahal, seperti kita ketahui bersama, pembangunan industri pariwisata pada intinya berupa aktivitas menggali segala potensi pariwisata, baik yang berasal dari sumber daya alam (*natural resources*), sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber buatan manusia (*man made resources*).

Pembangunan pariwisata dilakukan untuk mengembangkan dan mendayagunakan sumber dan potensi kepariwisataan menjadi kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan untuk memperbesar kesempatan berusaha dan lapangan kerja, terutama bagi masyarakat setempat. Di samping itu, juga dengan pengembangan sektor wisata diharapkan dapat membantu pembangunan daerah sekaligus memperkenalkan alam, nilai, dan budaya masyarakat sekitar wisata (Sudiarditha, Suman, dan Kusnadi; 2001).

Pengembangan industri pariwisata dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga petani karena adanya kesempatan kerja di sektor nonpertanian. Di samping itu, pengembangan industri ini juga dapat meningkatkan

sikap masyarakat petani terhadap keterkaitan pengembangan industri pariwisata dengan kehidupan petani. Walaupun demikian, umumnya petani tidak mengetahui bahwa pengembangan pariwisata membutuhkan komoditas pertanian karena kurang adanya usaha yang secara sadar menghubungkannya dengan sektor pariwisata tersebut.

Pengembangan sektor pariwisata diharapkan dapat mempercepat perkembangan sektor-sektor lainnya, baik sektor pertanian, industri kerajinan, angkutan, maupun usaha-usaha jasa lainnya. Ini berarti pengembangan sektor pariwisata dimaksudkan pula untuk membantu meningkatkan pendapatan masyarakat petani. Oleh karena itu, pembangunan sektor pariwisata dapat dikaitkan dengan pengembangan sektor pertanian dan sektor-sektor lainnya.

2. Peran Perempuan dalam Industri Pariwisata

Perempuan Indonesia, terutama di perdesaan, sebagai sumber daya manusia cukup nyata berpartisipasi khususnya dalam memenuhi fungsi ekonomi keluarga dan rumah tangga bersama laki-laki (Sajogyo, 1984). Beberapa hasil penelitian menunjukkan peran serta perempuan dalam berbagai industri di beberapa daerah cukup besar dan menentukan, dengan pengelolaan usaha yang bersifat mandiri. Peranan perempuan dalam industri rumah tangga sangat penting karena perempuan berperan sebagai tenaga kerja yang memberikan sumbangan yang tidak kecil bagi berlangsungnya

kegiatan industri rumah tangga tersebut (Lestari, Santoso, dan Sulastri; 1997).

Perempuan di daerah perdesaan yang bergerak di sektor produktif umumnya berfungsi multi dimensi, yakni sebagai ibu rumah tangga, tenaga kerja, anggota masyarakat, dan pengelola usaha. Keluarga merupakan unit pengambil keputusan yang menentukan berapa orang dan siapa di antara anggota keluarga yang harus bekerja dan berapa jam setiap hari orang tersebut perlu bekerja, mengurus rumah tangga, dan meneruskan sekolah.

Dalam pembagian kerja secara seksual, umumnya perempuan berperan pada sebagian besar pekerjaan rumah tangga, mengasuh anak, dan hanya sedikit perempuan yang bekerja di sektor publik (mencari nafkah). Bahkan ada sebagian perempuan yang baru melakukan kerja di sektor publik jika penghasilan suami mereka tidak mencukupi kebutuhan keluarganya lagi. Sejalan dengan kemajuan pembangunan nasional secara keseluruhan, untuk saat ini terdapat kecenderungan meningkatnya keikutsertaan perempuan di dalam mencari nafkah bagi keluarga. Berdasarkan berbagai kajian empiris yang memusatkan perhatian pada studi curahan kerja laki-laki dan perempuan, ternyata perempuan juga turut berperan di berbagai bidang, seperti pertanian, peternakan, kerajinan, industri, dan usaha-usaha lainnya (Wahyuningsih, dkk., 1995). Implikasi dari keadaan ini, antara lain, ditunjukkan dengan adanya perubahan atau pergeseran peran antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga.

Perubahan peran yang terjadi mengarah pada pergeseran peranan di bidang ekonomi, yang semula dipegang laki-laki saja kini perempuan pun telah dapat memasuki ranah tersebut. Kegiatan perempuan dan rumah tangga menjadi tidak terbatas dalam proses sosialisasi dan reproduksi karena perempuan telah banyak melakukan kegiatan ekonomi bersama dengan laki-laki di luar rumah tangga.

Demikian juga halnya perempuan di daerah perdesaan bersedia mencari nafkah demi menunjang tugas suami mereka dengan tidak mengesampingkan tugas-tugas rumah tangganya. Dalam kegiatan ekonomi keluarga, rumah tangga merupakan kesatuan utama bagi produksi, konsumsi, dan reproduksi serta interaksi sosial. Kegiatan laki-laki dan perempuan tidak dapat dipahami secara terpisah, justru sebaliknya diperlukan analisis pembagian kerja antara semua anggota keluarga yang mencerminkan hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Ironisnya, walaupun perempuan sudah bekerja cukup keras, partisipasi perempuan yang tinggi tersebut tidak tampak, bahkan hilang begitu saja. Tidak tampaknya partisipasi kerja perempuan ini disebabkan oleh nilai dan norma yang berbias *gender* (Heyser, 1985).

Menurut Doyle (1985), *gender* dapat diartikan sebagai perbedaan laki-laki dan perempuan secara psikologi, sosial, dan budaya, bukan berdasarkan faktor biologis. Berdasarkan perspektif psikologis, terdapat konsep *gender* stereotipe, yaitu sesuatu yang dianggap khas bagi perempuan dan lainnya khas bagi laki-laki. Sebagai

contoh adalah laki-laki perkasa, sedangkan perempuan lemah lembut. Selanjutnya dari perspektif sosiologis, terdapat konsep *gender norm* dan *gender role* (norma dan peran *gender*), yaitu nilai dan norma yang membedakan laki-laki dan perempuan yang selanjutnya membedakan pula perannya.

Aspek *gender* ini sudah mencapai tahap internalisasi di masyarakat dan disosialisasikan dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi sehingga sering kali membatasi perempuan dan laki-laki pada tempat-tempat tertentu. Penelitian Stoler (1977) menunjukkan perempuan kelas bawah di perdesaan mempunyai otonomi yang tinggi karena berperan di sektor publik.

Kurangnya partisipasi perempuan dalam pembangunan diakibatkan oleh masih diterimanya anggapan yang menyatakan tugas perempuan yang utama adalah sebagai ibu rumah tangga dan tidak bekerja mencari nafkah (Ware, 1981). Hal tersebut tercermin pula dalam Program Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Program inilah yang telah menyosialisasikan perempuan di perdesaan untuk melaksanakan lima kewajiban yang dibebankan kepada dirinya. Adapun kelima kewajiban tersebut adalah sebagai berikut.

1. menghasilkan generasi bangsa di masa depan
2. sebagai istri dan pendamping setia dari suami
3. sebagai ibu dan pendidik bagi anak-anaknya
4. mengurus rumah tangga
5. sebagai warga negara

Dari kelima butir program pendidikan kesejahteraan keluarga tersebut tidak ada satu pun yang secara jelas mewajibkan perempuan untuk bekerja di luar rumah. Butir kelima secara tersamar mencantumkan kedudukan perempuan sebagai warga negara yang tentu saja mempunyai tanggung jawab secara moral untuk berbuat sesuatu.

3. Pariwisata dan Peningkatan Peran Perempuan

Pariwisata merupakan sektor yang terus dikembangkan di Indonesia dan akan menjadi primadona baru dalam menunjang pembangunan nasional. Sejalan dengan pembangunan ekonomi tersebut, di Kabupaten Bantul untuk saat ini juga meletakkan sektor pariwisata sebagai salah prioritas pembangunan daerah untuk menambah pendapatan daerah. Kegiatan pariwisata sebagai salah satu alternatif untuk mendapatkan penghasilan bagi masyarakat dan devisa bagi negara sudah tidak diragukan lagi, meskipun di Indonesia sektor ini mengalami pasang surut. Seperti misalnya sebelum krisis ekonomi pariwisata menjadi sektor andalan bagi pemerintah karena memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian negara. Meskipun mengalami penurunan sejak terjadinya krisis sekaligus ketidakstabilan politik di Indonesia paling tidak 5 juta wisatawan mancanegara dan lebih dari 100 juta perjalanan wisatawan domestik tetap merupakan faktor penggerak ekonomi yang cukup signifikan di Indonesia. Dengan jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara yang datang, maka

sektor pariwisata tetap memberikan kesempatan kerja dan berusaha masyarakat Indonesia baik formal maupun tidak formal.

Untuk mengatasi penurunan jumlah wisatawan mancanegara yang bersifat massal serta pemahaman pemerintah dan wisatawan terhadap dampak negatif pariwisata massal, akhir dekade ini telah dimulai kegiatan pariwisata yang mengarah pada *Special Interest Tourism (SIT)* yang ditandai dengan beberapa ciri khas, di antaranya adalah berskala kecil, berkelanjutan, serta melibatkan masyarakat lokal sehingga memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitarnya. Keberadaan fasilitas untuk pariwisata massal seperti misalnya pembangunan kompleks BTDC, Nusa Dua, Bali ternyata akhirnya tidak memberikan pengaruh yang signifikan bagi masyarakat sekitarnya karena sebagian besar yang bekerja di bidang *hospitality* tersebut adalah masyarakat dari luar daerah tersebut. Hal ini juga terjadi di Thailand (Phuket), di mana masyarakat lokal karena keterbatasan pendidikan dan pengetahuan serta kemampuan bahasa Inggris, kalah bersaing dengan pencari kerja dari luar wilayah Phuket (Thailand Tourism Authority, 2005). Meskipun begitu, usaha yang positif telah mulai dilakukan yaitu dengan dibukanya sebuah Spa and Salon berskala internasional yang melibatkan orang lokal dengan diberi pendidikan dan sertifikasi sehingga mereka bisa bekerja di sektor tersebut (Bangkok Post, 19 October 2005).

Berkembangnya model-model SIT seperti *Community-based ecotourism*

enterprises (Usaha pariwisata berbasis masyarakat) di Taman Nasional Gunung Halimun, akan memberikan manfaat ekonomi sebagai faktor pendorong utama, serta memberikan manfaat lain karena keterlibatan masyarakat lokal secara psikologis akan memberikan pengaruh kepercayaan diri yang besar bagi orang yang terlibat di dalamnya sekaligus akan memberikan rasa tanggung jawab yang besar terhadap kelangsungan kehidupan di lingkungannya (*Environmental Sustainability*) (Scheyvens, 2000). Berkembang juga jaringan ekowisata desa (JED) di Bali yang terdiri dari Desa Pelaga, Sibetan, Tengan, dan Nusa Ceningan sangat membantu usaha-usaha peningkatan peran masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan pariwisata di daerahnya. Proses pengembangan pariwisata tersebut disyaratkan melibatkan masyarakat setempat, tidak hanya dalam proses inisiasi tetapi pada tahapan pelaksanaan, seperti pembangunan *ecolodge* (penginapan yang memenuhi persyaratan kelestarian lingkungan) di Gunung Halimun yang sejak awal telah melibatkan masyarakat secara aktif. Meskipun praktek di lapangan menunjukkan beberapa kendala yang dialami oleh fasilitator, tetapi keterlibatan masyarakat setempat sangat membantu mengurangi problem yang diasosiasikan dengan pengembangan pariwisata. Di Kawasan Kuta, dan sekitarnya meskipun sangat terbatas jumlahnya, kegiatan yang mengarah ke konsep pariwisata telah dilaksanakan oleh para pelaku pariwisata. Oleh sebab itu perlu kiranya kita melihat sejauh mana keterlibatan kaum perempuan di

sektor ini memberikan pengaruh baik secara sosial, budaya, dan tentu saja secara ekonomi (Suardana, 2010).

4. Partisipasi Perempuan dalam Bidang Ekonomi

Perempuan Jawa sering disebut sebagai "Manager Rumah Tangga". Tanggung jawab mereka tidak saja dalam mengatur keuangan rumah tangga, tetapi juga mencari nafkah (Geertz, 1961). Tanggung jawab untuk ikut mencari nafkah ini semakin menonjol di kalangan perempuan dari keluarga miskin karena hasil pendapatan suami tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Partisipasi ekonomi perempuan ternyata tidak mengubah peranan ideal perempuan. Dengan demikian, meskipun telah banyak perempuan yang bekerja di luar rumah, apa pun kedudukan mereka dan berapa pun sumbangan ekonomi mereka, tugas utama yang harus ditanggung oleh perempuan adalah tetap mengurus rumah tangga (Sumbung, dalam Siswidiyanto dan Rahayu, 1998). Hal ini berindikasi terhadap peran perempuan, yakni meskipun perempuan bekerja mencari nafkah, tetapi mereka juga mempunyai beban mengurus rumah tangganya. Perempuan yang bekerja seolah-olah diharuskan menjaga keseimbangan kedua peran yang disandangnya tersebut. Selain harus melakukan pekerjaan rumah tangga, perempuan perdesaan juga harus memenuhi peranan mereka sebagai penjaga ikatan kekerabatan dan ketetangaan (Geertz, 1961).

Peran "Ideal" yang diharapkan dari perempuan ini sebenarnya merupakan salah satu hambatan bagi perempuan yang ingin memasuki lapangan kerja. Menurut Allen dan Wolkowitz (1987), peran "ideal" perempuan merupakan hambatan bagi perempuan yang bekerja mencari nafkah dan hambatan ini disebutnya sebagai "hambatan ideologis". Selain hambatan ideologis, masih ada lagi hambatan yang lain yang disebut dengan "hambatan material", misalnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Hambatan-hambatan ini merupakan penjelasan parsial dari adanya ketidakseimbangan berdasarkan *gender* dalam lapangan pekerjaan. Perbedaan upah untuk pekerjaan yang sama dan adanya segregasi pekerjaan berdasarkan jenis kelamin merupakan manifestasi ketidakseimbangan berdasarkan *gender* (*gender inequality*) dalam lapangan pekerjaan.

Ada berbagai teori yang menerangkan ketidakseimbangan berdasarkan *gender* dalam lapangan pekerjaan. Coverman (dalam Siswidiyanto dan Rahayu, 1998) memasukkan berbagai teori ke dalam dua kelompok besar, yaitu teori-teori individualis dan teori strukturalis. Teori individualis didasarkan pada asumsi bahwa pekerjaan dan upah yang diterima seseorang berkaitan langsung dengan karakteristik personal tiap-tiap pekerja. Setiap pekerja dianggap mempunyai kesempatan yang sama untuk memasuki lapangan pekerjaan dan mencapai prestasi tertentu. Sebaliknya, teori strukturalis lebih menitikberatkan pada pentingnya faktor sosial kultural dan kelembagaan

yang memengaruhi pencapaian seorang pekerja. Inti uraian dari Covermas tersebut adalah upaya untuk menjelaskan ketidakseimbangan berdasarkan jenis kelamin dalam lapangan kerja secara multi dimensional.

Sementara itu, ketidakseimbangan berdasarkan *gender* dalam lapangan pekerjaan diungkap lebih lanjut oleh Anker dan Hein (1986). Kedua orang tersebut cukup berhasil menjelaskan hubungan *gender* yang terjadi dengan merangkum tiga teori yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Teori itu meliputi teori Neoklasik, teori Segmentasi Pasar Tenaga Kerja, dan teori *Gender* atau Feminis.

Teori Neoklasik menerangkan pembagian kerja seksual dengan menekankan perbedaan seksual dalam berbagai variabel yang mempengaruhi produktivitas pekerjaan dan *suplai* pekerja. Perbedaan-perbedaan itu meliputi lamanya jam kerja, tanggung jawab rumah tangga, dan kekuatan fisik. Semua ini didasari oleh asumsi bahwa di dalam persaingan antar-pekerja, pekerja memperoleh upah sebesar *marginal product* yang dihasilkannya.

Asumsi lain dari teori ini adalah keluarga mengalokasikan sumber daya mereka secara rasional. Konsekuensi logis dari hal ini adalah anggota rumah tangga laki-laki memperoleh investasi *human capital* yang lebih tinggi daripada perempuan. Selanjutnya perempuan memperoleh pendapatan dan produktivitas yang lebih rendah daripada laki-laki karena perempuan memiliki *human capital* yang lebih rendah daripada laki-laki.

Teori ini mendapatkan kritik karena mempunyai dua kelemahan. Kelemahan yang *pertama* berkaitan dengan asumsinya tentang perbedaan fisik sebagai sumber adanya "pekerjaan-pekerjaan khas perempuan". Secara biologis "mengandung dan melahirkan" memang merupakan pekerjaan khas perempuan. Selain itu, tidak ada alasan biologis yang menjelaskan mengapa perempuan harus mengasuh anak atau melakukan pekerjaan domestik lainnya. Kelemahan *kedua* berkaitan dengan asumsinya yang menyatakan laki-laki dan perempuan mempunyai akses yang sama terhadap peluang-peluang kerja. Asumsi ini tidak mempertimbangkan adanya segmentasi pasar tenaga kerja yang tidak dapat dijelaskan berdasarkan perbedaan seksual dalam *human capital*.

Teori pasar tenaga kerja ganda membagi tenaga kerja atau pekerjaan menjadi dua, yaitu pekerjaan-pekerjaan sektor primer dan pekerjaan-pekerjaan sektor sekunder. Pekerjaan sektor primer menjanjikan upah, jaminan keamanan, dan peluang untuk promosi yang lebih baik daripada sektor sekunder. Pekerjaan sektor primer mencakup jenis-jenis pekerjaan yang menuntut keahlian pekerjaan yang *firm specific* dan pekerja yang stabil. Tuntutan ini diimbangi oleh upah yang lebih tinggi dan peluang untuk promosi yang lebih terbuka. Ada anggapan yang selama ini berkembang, yaitu pekerja perempuan merupakan pekerja yang tidak stabil. Hal ini menyebabkan pekerja perempuan cenderung terkonsentrasi dalam pekerjaan-pekerjaan di sektor sekunder.

Teori segmentasi pasar tenaga kerja menunjukkan dengan jelas bahwa pekerja laki-laki dan perempuan tidak bersaing di landasan yang sama dan karenanya, tidak mempunyai akses yang sama ke lapangan kerja. Adanya dua pasaran kerja yang terpisah bagi laki-laki dan perempuan sangat menentukan rendahnya upah tenaga kerja perempuan. Oleh karena itu, pilihan tenaga kerja perempuan relatif terbatas. Mereka cenderung terakomodasi dalam pekerjaan-pekerjaan yang memiliki kekhasan sebagai "pekerjaan perempuan". Akibatnya, terjadilah penawaran tenaga kerja yang berlebih dalam pekerjaan-pekerjaan semacam ini, yang pada gilirannya menyebabkan upah yang rendah.

Teori segmentasi pasar tenaga kerja ini dianggap tidak mampu menjelaskan mengapa segmentasi pasar tenaga kerja berdasarkan jenis kelamin terjadi. Menurut teori *gender* atau *feminis*, kedudukan perempuan yang relatif rendah dalam pasar tenaga kerja ini tidak dapat dipisahkan dari sistem sosial yang menempatkan perempuan pada kedudukan yang lebih rendah daripada laki-laki.

Apapun kendala budaya dan biologis yang dihadapi oleh pekerja perempuan, mereka harus terus bekerja untuk memperoleh upah. Alokasi upah yang diperoleh perempuan dari kegiatannya mencari nafkah ternyata berhubungan erat dengan status perkawinannya. Perempuan yang sudah menikah cenderung menyumbangkan seluruh penghasilannya bagi kepentingan ekonomi rumah tangga (Niehof, 1985). Sebaliknya, pekerja perempuan yang belum menikah lebih

bebas mengalokasikan upahnya, termasuk untuk kepentingan pribadi.

Pandangan manusia tentang identitas *gender* ini sudah menjadi ideologi dan sudah menghegemoni. Mempertanyakan identitas *gender* membuat kita merasa terancam, merasa bahwa dasar dari pengertian kita tentang keberadaan kita akan dibongkar, merasa relasi di antara kita yang sudah mapan terancam untuk digeser, merasa tradisi dan kebudayaan kita akan diporak-porandakan. Namun merupakan hal yang sangat penting untuk memahami bagaimana anak perempuan dan anak laki-laki berproses menjadi dewasa.

Bagaimana kita memahami sikap maskulin (kelaki-lakian) dan feminin (keperempuanan), bagaimana kita menentukan perilaku feminin dan maskulin, serta bagaimana kita dididik melaksanakan tugas dan kewajiban menurut jenis kelamin merupakan dasar relasi perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Apa yang kita pelajari dari lingkungan hidup kita sejak lahir, tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tentang kedudukan kita masing-masing, tentang usaha terhadap tanah/kekayaan/harta warisan, tentang adat dari suku kita, tentang tradisi, dan tentang faktor-faktor yang lain merupakan ciri kehidupan bermasyarakat. Dalam beberapa masyarakat, perempuan adalah petani, peternak sapi/kerbau/kambing, pengolah tanah, penyadap karet, dan nelayan. Di masyarakat yang lain pekerjaan perempuan sebagai petani dianggap "melawan kodrat". Di lain aspek kehidupan terjadi perang, perpindahan penduduk, atau banyak faktor yang

mendorong perempuan untuk mendorong keluarga saja (Murniati, 2003).

Kebiasaan ini dijadikan tradisi supaya perempuan mendukung nilai produksi melalui pekerjaan keluarga di rumah. Demikian pula pekerjaan dan peran laki-laki tidak sama untuk setiap daerah dan waktu. Jadi peran *gender* tidak hanya berbeda untuk masyarakat yang satu dengan yang lain, tetapi juga berubah dari waktu ke waktu. Analisis *gender* tidak hanya melihat perbedaan peran dan kegiatan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga melihat relasi mereka. Dari relasi ini akan tampak status perempuan dan laki-laki. Analisis ini tidak hanya menanyakan "siapa yang mengambil keputusan", siapa yang mendapatkan manfaat, siapa yang menguasai sumber-sumber produksi seperti tanah/modal, siapa yang menguasai sumber-sumber produksi, siapa yang mengontrol produksi, siapa yang mengontrol kehidupan.

Faktor apa saja yang memengaruhi hubungan laki-laki dan perempuan. Bagaimana peran faktor adat, tradisi, hukum, politik, budaya, agama, dan sebagainya mempengaruhi hubungan perempuan dan laki-laki yang sudah dikonstruksikan dalam pandangan stereotipe (pandangan baku). Perbedaan pengalaman individu pada gilirannya diabaikan. Konstruksi sosial ini dikunci mati oleh mitos dan agama. Muncullah perbedaan peran dan status. Kaum laki-laki meletakkan status lebih tinggi daripada kaum perempuan. Situasi ini yang dinamakan perempuan berada dalam status subordinasi. Status ini yang menyebabkan perempuan direndahkan dan dilecehkan. Perempuan bekerja bukan karena keputusannya,

tetapi mereka bekerja karena perintah atau keputusan laki-laki. Untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan, berarti pekerjaan perempuan harus ditambah. Perempuan harus dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan karena lebih separuh penduduk Indonesia adalah perempuan.

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan '*key informants*' dari masing-masing kelompok '*stakeholders*' dengan menggunakan metode wawancara mendalam serta observasi lapangan. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian awal yang sifatnya uraian dan dibahas dengan teori atau konsep-konsep dan dipadukan dari data pandangan serta pendapat para orang kunci yang terlibat di bidang pariwisata di kawasan Pandansimo.

Data penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu data primer yang diambil dengan teknik wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dan observasi lapangan (*site observations*) terhadap kegiatan pariwisata, sedangkan data sekunder berupa informasi terkait yang tersedia misalnya data statistik serta informasi dari objek pariwisata. Kedua jenis data tersebut digabungkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang sedang diteliti sehingga didapatkan gambaran yang jelas bagaimana keadaan pemberdayaan perempuan di sektor pariwisata di Kawasan Pandansimo. Sampel penelitian ini diambil secara purposif,

yaitu menetapkan pelaku yang terlibat dalam kegiatan pariwisata di Kawasan Pandansimo.

Hasil dan Pembahasan

Keterlibatan dan Peran Perempuan di Sektor Pariwisata

Keterlibatan perempuan di sektor pariwisata nampaknya memang semakin meningkat dalam segala bidang usaha pariwisata. Meskipun secara statistik nampak masih terbatas, data penelitian ini menunjukkan bahwa di kawasan obyek wisata Pandansimo, nampak telah terdapat keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor. Penelitian ini melihat keterlibatan perempuan dalam kegiatan pariwisata, dari dua sisi, yaitu mereka, yang duduk sebagai pengambil keputusan (pemilik) serta mereka yang terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata seperti misalnya penjual ikan hasil tangkapan maupun pekerja informal.

Berdasarkan hasil penelitian sebelum dan sesudah pariwisata berkembang secara dinamis di kawasan Pantai Pandansimo, pembagian kerja perempuan dan laki-laki di sini tidak terlalu berbeda, kecuali pada kegiatan domestik yang sepenuhnya dibebankan kepada perempuan (Setyawati, 2010). Aktivitas kerja lain, seperti bekerja di sawah, mencari pakan ternak, mencari kayu bakar, dan merawat ternak, merupakan kerja bersama atau dilakukan secara bergantian. Pembangunan pariwisata di Pantai Pandansimo telah menciptakan layanan wisata yang beraneka ragam, di

antaranya membuka warung, menjual ikan segar (mentah), menyewakan tikar, memasak ikan, dan menyewakan tempat bagi wisata.

Ditinjau dari total waktu kerja setelah adanya pariwisata, ternyata lama kerja efektif perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki, yaitu 16 jam berbanding 9 jam atau hampir dua kali lipatnya. Namun ditinjau dari beban kerjanya, laki-laki tampaknya memiliki beban yang lebih berat karena harus mencari ikan di laut, yakni mulai dari persiapan hingga mereka mencari ikan di laut. Waktu yang dibutuhkannya pun lebih lama, sejak dini hari hingga mereka memperoleh ikan yang cukup sebagai hasil tangkapannya.

Introduksi pariwisata di Pantai Pandansimo dalam skala tertentu telah mendorong tata hubungan kerja baru bagi perempuan dan laki-laki setempat. Kerja sama terjadi, perempuan membantu menyiapkan kebutuhan suami mereka sebelum melaut dan setelah suami memperoleh ikan, maka perempuan (istri) akan menjual ikan tersebut dengan memasaknya dan pada akhirnya menjualnya dengan harga yang lebih tinggi daripada ikan yang masih mentah. Hasil tangkapan melaut itu juga dijual para suami ke TPI, selain memberikannya kepada para istri mereka untuk diolah menjadi hasil olahan yang lebih memberi nilai tambah bagi penghasilan mereka. Para istri nelayan itu pun selain membuka warung di sekitar wisata yang menjual ikan hasil tangkapan suami, mereka juga dapat menjual berbagai barang yang dibutuhkan oleh para wisatawan yang berkunjung. Pada kasus perempuan

(istri) yang hanya menjual ikan mentah hasil tangkapan suami mereka, terlihat laki-lakilah yang dominan memegang peranan. Hal ini disebabkan oleh pola hubungan kerja laki-laki dan perempuan dalam hal ini diatur oleh paguyuban pemilik perahu yang ada di sana dan TPI setempat sehingga jelas didominasi oleh laki-laki.

Kehadiran pariwisata di Pantai Pandansimo tampaknya menciptakan kesenjangan besaran akses menuju ke pariwisata ditinjau dari perspektif *gender*. Dalam hal ini sumber daya perempuan cenderung belum optimal memasuki aktivitas pariwisata dibandingkan dengan laki-laki. Ada beberapa kondisi berkaitan dengan hal tersebut, di antaranya, adalah sebagai berikut.

1. Perempuan lebih banyak mencurahkan tenaganya untuk pekerjaan domestik dan pertanian sehingga relatif tersedia sedikit waktu untuk memasuki jasa wisata.
2. Jenis jasa wisata yang berkembang saat ini umumnya masih dianggap sebagai "kawasan laki-laki". Jasa transportasi, seperti ojek dan penyewaan perahu, dianggap lebih pantas dikerjakan oleh laki-laki. Perempuan sendiri sulit memasuki jasa wisata yang dipersepsikan sebagai "kawasan perempuan", seperti sektor perdagangan ikan di lokasi wisata, karena jenis pekerjaan ini pun sudah dikelola oleh kaum laki-laki setempat. Penjaja makanan dan memasak ikan hasil tangkapan nelayan tampaknya satu-satunya kesempatan bagi perempuan untuk tampil secara nyata dalam sektor pariwisata setempat.
3. Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan wisata cenderung didominasi oleh laki-laki. Sebagai contoh, para pemuka masyarakat informal bersama dengan pemerintah daerah (yang umumnya diwakili oleh laki-laki) menentukan pelaksanaan kegiatan ritual yang sekaligus merupakan konsumsi wisata. Baru pada prosesi ritualnya perempuan ikut ambil bagian, misalnya dalam mengantar sesaji pada upacara sedekah laut.

Ditinjau dari perspektif *gender*, barangkali kerugian perempuan yang terbesar adalah kehilangan kesempatan dalam proses pengambilan keputusan wisata. Hal ini karena pada dasarnya struktur kebijakan pariwisata di kawasan Pantai Pandansimo adalah cerminan pengambilan keputusan laki-laki. Agenda wisata yang dibuat, misalnya dalam pengaturan acara adat (labuhan atau sedekah laut), yang sekaligus untuk konsumsi wisata, merupakan kesepakatan antara pemerintah daerah dan para pemuka masyarakat adat lokal yang notabene adalah para laki-laki. Perempuan dilibatkan di dalamnya hanya pada prosesi ritualnya saja. Demikian juga dengan penentuan harga ikan yang dimasak oleh para perempuan di lokasi wisata Pantai Pandansimo ini pun ditentukan oleh para laki-laki. Tidak aktifnya perempuan dalam pengambilan keputusan wisata disebabkan, terutama, oleh masih kuatnya budaya patriarki di daerah setempat, dengan laki-laki yang masih dominan melakukakan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan.

Pembangunan pariwisata di kawasan Pantai Pandansimo ternyata memberikan dampak yang berbeda bagi perempuan dan laki-laki setempat. Paradoks terjadi, dinamika pariwisata ternyata justru mendorong perempuan ke dalam ruang aktivitas pertanian, yang semula lebih cenderung didominasi oleh laki-laki dan justru menjauhkan perempuan dari dinamika pariwisata itu sendiri. Sebaliknya, laki-laki justru memasuki kawasan aktivitas pariwisata dan cenderung meninggalkan sektor pertanian.

Selain itu, sistem pengambilan keputusan wisata yang dominan laki-laki telah menyebabkan kerugian perempuan dalam mendapatkan akses berkaitan dengan informasi pariwisata. Hal ini semakin memperkuat keyakinan bahwa pada dasarnya perempuan merupakan *the second decision maker* dalam banyak proses pembangunan, yang berkaitan dengan posisinya sebagai penerima *second hand information*.

Di sisi lain, laki-laki mendapatkan keuntungan relatif dengan hadirnya pariwisata di Pantai Pandansimo. Laki-laki segera dapat mengintegrasikan dirinya dengan aktivitas wisata yang ada, khususnya berpartisipasi dalam jasa transportasi wisata yang ada di lokasi setempat, yang tentunya mampu memberikan kontribusi ekonomi yang cukup besar bagi keluarganya dan sekaligus mendapatkan ruang perwujudan diri yang lebih luas dalam dimensi pariwisata setempat. Di sisi lain, perempuan praktis kurang memperoleh kesempatan yang berarti dalam memanfaatkan aktivitas pariwisata yang ada karena alasan budaya,

keamanan, dan rendahnya tingkat keterampilan wisata yang dikuasainya. Oleh karenanya, praktis perempuan kurang dapat mengaktualisasikan dirinya di sektor pariwisata ini dengan lebih optimal.

Keterlibatan Perempuan Menunjang Peran dan Status Perempuan secara Ekonomis

Apa yang dikatakan oleh Linberg (1999) bahwa kegiatan pariwisata memberikan peran yang sangat besar dalam hal '*generating economic benefits*' tampak pada hasil penelitian ini. Sebagian besar informan menyatakan bahwa dengan mengusahakan dan bekerja di bidang pariwisata, secara umum mereka mendapatkan penghasilan yang cukup memadai. Meski hanya sebagai income tambahan dalam keluarga peran pariwisata ini sangat besar secara psikologis memberikan kenyamanan karena mendapatkan income tambahan sehingga keuangan keluarga bisa terbantu. Secara umum, pariwisata mengenal '*seasonality*' dimana pada saat tertentu barang atau jasa yang ditawarkan juga akan mendapatkan pengaruh tersebut. Tetapi sebagian besar informan mengatakan bahwa selama ini pekerjaan mereka tidak begitu mengenal tinggi rendah. Mereka tetap terus bekerja dan mendapatkan penghasilan.

Dari hasil penelitian ternyata diketahui bahwa pekerja perempuan lebih banyak mengisi kesempatan kerja pada jenis usaha kios (14,3%), sementara laki-laki hanya 9,2%. Pada sektor jasa pekerja perempuan terkonsentrasi pada jenis warung makan

(36,6%) dan usaha souvenir (6,3%). Pekerja perempuan ini lebih banyak terlibat, karena kegiatan pada kedua jenis usaha ini relatif tidak memerlukan keterampilan khusus.

Responden juga menyatakan bahwa secara ekonomis memang telah menghasilkan, tetapi beberapa di antaranya menghendaki kenaikan pendapatan ekonomi secara teratur, agar mereka bisa menyesuaikan dengan kebutuhan keluarga mereka. Dalam konteks ini bisa dikatakan bahwa karena rata-rata usaha mereka termasuk berskala kecil maka pendapatan mereka berkisar pada jumlah upah minimum tidak seperti perusahaan besar yang diatur oleh pemerintah. Jika perempuan bekerja di tempat usaha orang lain, maka penentuan jumlah gaji biasanya ditentukan oleh pemilik tanpa mendapat persetujuan dari para pekerja. Namun berdasarkan pendapat responden, tenaga yang mereka keluarkan telah sesuai dengan pendapatan yang mereka terima.

Pendapatan mereka rata-rata hanya sebagai *income* tambahan dalam keluarga dan mereka menyatakan bahwa dengan mempunyai penghasilan sendiri mereka merasa mempunyai hal yang tidak jauh berbeda dengan suami/partner dalam mengambil keputusan dalam keluarga.

Di samping itu, Scheyvens (2000) menyatakan bahwa biasanya para perempuan ini tidak termasuk dalam pekerjaan formal dan ini juga sangat jelas dalam penelitian ini. Berdasarkan status pekerjaan, pekerja perempuan lebih banyak terlibat pada jenis kegiatan yang termasuk sektor informal (21,%), jauh lebih tinggi dibandingkan dengan

pekerja laki-laki (14,1%). Dengan adanya pariwisata di Pandansimo diharapkan perempuan lebih bisa dilibatkan secara aktif, tidak hanya sebagai pekerja saja tetapi juga dapat meningkatkan peran serta status mereka. Dalam hal '*formal employment*', pengalaman di daerah lain menunjukkan bahwa perempuan biasanya tidak begitu dilirik sehingga seringkali menimbulkan permasalahan di sekitar tempat tersebut. Berdasarkan jenis pekerjaan yang ditekuni oleh perempuan, pekerja perempuan biasanya mengalami marginalisasi sebagai proses feminisasi atau segregasi (Wiratha, 2002.). Hal ini terlihat dari terkonsentrasinya pekerja perempuan ke dalam pekerjaan yang seolah-olah merupakan pekerjaan perempuan, seperti: pedagang warung rokok dan makanan ringan, pedagang ikan, dan pekerjaan domestic/rumah tangga lainnya.

Keterlibatan dan Peran Perempuan Menunjang Peran dan Status secara Sosial dan Budaya

Keterlibatan seorang perempuan dalam bekerja termotivasi oleh alasan ekonomi dan sosial. Secara umum perempuan bekerja dengan alasan seperti misalnya untuk mencari tambahan penghasilan keluarga atau untuk alasan pribadi seperti meningkatkan peran dan status mereka dalam masyarakat. Dengan bekerja di sektor pariwisata, perempuan mendapatkan tambahan pengetahuan secara tidak langsung, seperti misalnya kemampuan (*skills*) berkomunikasi dengan orang lain (wisatawan), selain itu juga kemampuan manajemen perempuan

juga semakin meningkat. Seiring dengan meningkatnya kemampuan tersebut mereka secara sosial mempunyai *'bargaining power'* yang lebih baik. Dengan bekerja mereka merasa memiliki nilai tambah (*added value*) di dalam masyarakat. Hal ini membuat mereka merasa lebih dihargai ketimbang hanya sebagai ibu rumah tangga biasa atau, sebagai perempuan yang tidak bekerja. Dengan keterlibatan di dunia pariwisata, dalam hal ini pariwisata, responden juga yakin bahwa masyarakat lebih menghargai sehingga lebih bisa berperanserta dalam kegiatan sosial di lingkungannya seperti misalnya di lingkungan RT dan dalam kegiatan PKK serta lebih mempunyai kepercayaan diri karena merasa mempunyai kelebihan di banding dengan mereka yang tidak bekerja.

Di samping itu, Scheyvens (2000) menyatakan bahwa dengan bekerja dan bergabung dalam kelompok, maka fungsi pemberdayaan sosial bisa meningkat. Rasa kesatuan dan persatuan karena terikat dalam kegiatan yang sama akan memberikan dinamika sosial yang lebih tinggi yang pada gilirannya masing-masing individu merasa diikutsertakan dalam kegiatan ekonomi yang menghasilkan. Para perempuan inipun merasa bahwa mereka diperlakukan sesuai dengan kemampuannya bukan karena mereka perempuan. Secara umum, responden menyatakan bahwa keterlibatan dalam pengembangan kemampuan di tempat bekerja memberikan suatu kepuasan pada mereka sehingga bisa memproduksi secara lebih bagus di masa yang akan datang. Dari dalam keluarga, para perempuan ini menyatakan bahwa

mereka mempunyai kesempatan yang sama dalam keluarga karena kebanyakan mereka diberi hak yang sama dalam mengambil keputusan-keputusan yang diambil dalam keluarga.

Hal ini penting karena secara sosial budaya masyarakat di kawasan Pandansimo masih menganggap perempuan posisinya lebih rendah dari kaum lelaki, sehingga mereka tidak diberi tanggung jawab yang besar baik di rumah maupun di tempat kerja. Sayangnya persepsi pekerja perempuan juga tidak jauh berbeda dengan pendapat para *stakeholder* pariwisata sehingga merekapun merasa baik-baik saja jika diperlakukan tidak sama karena mereka perempuan. Meski begitu ada beberapa informan yang menyatakan bahwa kesempatan mereka untuk berkembang sama besarnya dengan kaum laki-laki. Para perempuan yang belum memiliki peluang untuk berperan serta dalam pengembangan pariwisata pada umumnya menyatakan keinginannya untuk mengembangkan kemampuan sehingga secara sosial mereka lebih dihargai. Keterlibatan tersebut bisa keterlibatan aktif maupun aspiratif. Pertama mereka menyatakan perlu ikut berperan serta memberikan atau meningkatkan kesadaran masyarakat umum tentang arti penting pariwisata dan mendorong kaum perempuan untuk lebih banyak terlibat di dalamnya karena pariwisata membuka peluang kesempatan kerja bagi mereka. Kedua diperlukan dorongan dan motivasi dari para *stakeholder* di bidang pariwisata agar keinginan perempuan untuk lebih terlibat dalam pariwisata difasilitasi

sehingga keinginan tersebut bisa terwujud.

Dalam skala yang lebih luas, peningkatan status sosial dalam masyarakat karena, berperan serta dalam kegiatan pariwisata ada dua, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Yang pertama misalnya dengan bekerja mereka mendapatkan keuntungan ekonomis sehingga kehidupan keluarga akan terjamin, sedangkan pengaruh yang tidak langsung termasuk kesempatan mendapatkan akses yang lebih bagus terhadap fasilitas-fasilitas umum seperti misalnya sarana air bersih dan jalan yang semakin baik serta akses terhadap klinik-klinik kesehatan. Pariwisata yang efektif sebagai kegiatan yang berbasis masyarakat semestinya memberikan keuntungan bagi masyarakat, karena sebagian dari kegiatan mereka disisihkan untuk kegiatan konservasi alam jika kegiatan pariwisata melibatkan alam sebagai basis kegiatannya.

Dalam beberapa konteks sosial, perempuan kehilangan kesempatan mendapatkan keuntungan ekonomis karena norma sosial masyarakat setempat menganggap bahwa dengan bekerja di sektor pariwisata, mereka mendapatkan cap buruk di dalam masyarakat. Misalnya di daerah Himalaya (Lama, 1998) dan di Pangandaran, Jawa Barat (Wilkinson & Pratiwi, 1995) profesi guide biasanya adalah laki-laki. Perempuan yang berprofesi sebagai guide akan dicap sebagai 'pelacur' yang hanya tertarik untuk berhubungan dengan wisatawan domestik maupun asing.

Keterlibatan perempuan dalam kegiatan pariwisata juga bisa mengun-

tungkan secara kultural. Misalnya dengan terlibat di dalamnya, para pekerja perempuan akan mulai mengenal hasil karya seni dan budaya serta kegiatan-kegiatan budaya yang mendukung pariwisata, karena seni dan budaya merupakan bagian tak terpisahkan dari pariwisata. Mereka merasa bahwa kegiatan di bidang ini membawa pandangan ke arah budaya positif dan hal ini akan membawa kaum perempuan ke arah pemberdayaan perempuan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perkembangan budaya. Para responden mengatakan bahwa dengan bekerja di sektor pariwisata, mereka tambah mencintai budaya lokal seperti kesenian setempat sebagai salah satu produk budaya lokal. Para responden juga mengharapkan agar mereka lebih sering dilibatkan dalam acara-acara budaya sehingga mereka lebih bisa dikenal oleh masyarakat dan peluang mereka untuk memproduksi hasil karya bisa lebih banyak serta memberikan peluang pekerjaan bagi perempuan lain di sektor ini.

Peluang dan Tantangan dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Pandansimo

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa peluang dan kendala yang dihadapi oleh perempuan untuk bisa secara aktif terlibat dalam kegiatan pariwisata. Di antaranya adalah adanya kesempatan untuk mengembangkan potensi pribadi yang cukup besar yang nantinya bermanfaat bagi kegiatan pariwisata dan perempuan yang terlibat di dalamnya. Secara umum mereka beranggapan bahwa

peluang perlu ditingkatkan terutama oleh pemerintah untuk melibatkan mereka secara aktif dalam kegiatan riil, seperti misalnya pameran pariwisata tingkat regional maupun nasional.

Pengembangan jejaring juga cukup penting untuk dilakukan, terutama atas bantuan pemerintah agar pemasaran produk atau jasa bisa berkembang lebih luas. Namun jika dicermati secara lebih mendalam maka kendala yang dihadapi perempuan dalam pengembangan pariwisata di Pandansimo ini adalah lumayan besar, karena mereka masih memiliki keterbatasan antara lain kreativitas yang kurang, ketegasan, dan akses, baik untuk akses produksi dan jasa serta akses pemasaran. Oleh sebab itu perlu ditingkatkan *support* dari pemerintah daerah, tidak hanya untuk pengembangan produk, tetapi juga pemasaran serta peningkatan kemampuan (*skills*) dengan cara *training* serta kursus. Hal ini akan meningkatkan kemampuan mereka dalam memproduksi sehingga kesejahteraan mereka akan lebih terjaga.

Di samping akses terhadap kesempatan untuk berkembang menuju keadaan yang lebih baik, keterbatasan dana, ketenagakerjaan, profesionalisme kerja, dan kualitas produk pariwisata merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kendala yang dihadapi oleh perempuan yang terlibat dalam kegiatan pariwisata di Pandansimo, karena mereka sebagian besar berasal dari strata bawah. Dengan memberikan bantuan berupa *training* misalnya, para pekerja pariwisata bisa meningkatkan kemampuannya di bidang tersebut untuk selanjutnya dipakai sebagai pengembangan pariwisata di daerah

Kawasan Pandansimo. Lebih lanjut harus ada beberapa pihak yang membantu percepatan kemampuan mereka supaya lebih maju, misalnya pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak swasta yang mempunyai hubungan dengan pariwisata.

Hal yang lebih menguntungkan dalam konteks pariwisata di Kawasan Pandansimo bahwa peluang untuk lebih terlibat dalam pariwisata terbuka lebar karena kaum lelaki yang nota bene biasanya merupakan kelompok yang dominan tidak keberatan istri atau pasangannya bekerja. Hal ini nampak dari pendapat responden yang menyatakan bahwa partner mereka tidak melarang ketika mereka ingin tetap kerja di kawasan Pandansimo. Ini berarti bahwa peluangnya sangat besar.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Dari hasil wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi, dan kajian data sekunder, bisa disimpulkan bahwa keterlibatan perempuan di sektor pariwisata di Kawasan Pandansimo dapat digambarkan sebagai berikut: Perempuan telah cukup aktif terlibat dalam kegiatan pariwisata di Pandansimo, namun kesempatan mereka berkembang terhambat oleh kurangnya kemampuan mereka secara profesionalisme, skill, dan pengembangan manajerial.

Mereka beranggapan bahwa dengan posisi mereka pada saat ini sudah cukup baik, dibandingkan dengan keadaan mereka jika tidak bekerja.

Secara umum perempuan yang terlibat dalam kegiatan pariwisata di Pandansimo merasa bahwa keterlibatan mereka di bidang pariwisata sudah memberikan manfaat secara sosial, budaya, dan ekonomi. Dari segi sosial dan budaya, dengan aktif bekerja mereka mempunyai kesempatan yang lebih baik dalam mengutarakan pendapat serta berperan serta dalam memberikan keputusan-keputusan dalam keluarga. Dari sisi sosial, mereka juga merasa lebih mempunyai peran dalam masyarakat baik dalam kelompok-kelompok perempuan, maupun dalam rumah tangga mereka. Kegiatan mereka di bidang pariwisata juga memberikan peningkatan status mereka secara budaya. Seperti misalnya dengan aktif di bidang pariwisata, para perempuan menjadi semakin tahu bagaimana mempertahankan budaya lokal, di antaranya adalah produk kerajinan lokal, kesenian, dan adat-istiadat. Hal ini tentu saja sesuai dengan fungsi dari pariwisata yang di dalamnya mencakup kegiatan kultural/budaya di dalam masyarakat di sekitar daerah tujuan pariwisata. Dari segi ekonomis, sudah pasti mereka merasa mendapatkan manfaat yang baik dengan berperan serta dalam kegiatan pariwisata ini. Mereka mengatakan bahwa, meskipun pendapatan mereka tidak sangat tinggi tetapi sudah cukup membuat mereka bangga karena sebagai perempuan mereka telah memiliki penghasilan sendiri yang bisa membantu menghidupi keluarga.

Rekomendasi

Mengingat masih belum optimalnya peranan dan status perempuan dalam aktivitas wisata di Pantai Pandansimo, disarankan agar perempuan lebih diberi ruang pengambilan keputusan dan aktualisasi diri yang lebih luas dalam setiap pengaturan strategi dan implementasi kepariwisataan di kawasan Pantai Pandansimo. Hal tersebut dalam rangka mencapai kesetaraan *gender* yang diinginkan dan lebih mengoptimalkan peran laki-laki dan perempuan masyarakat setempat. Di samping itu juga perlu dilakukan penataan dan pengembangan lokasi wisata yang lebih menarik dan mengangkat budaya lokal agar masyarakat setempat dapat lebih berpartisipasi dan menikmati produk wisata yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi pantai Pandansimo.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, Sheilla dan Wolkowitz, Carol. 1987. *Homeworking, Myths and Realities*. Hongkong: Macmillan Education Ltd.
- Anker, Richard dan Hein, Catherine. 1986. *Sex, Inequalities In The Third World*. London: Macmillan Press.
- De Kadt, Emanuel (ed.). 1979. *Tourism, Passport to Development?* Washington: Oxford University Press.
- Doyle, J.A. 1985. *Sex and Gender: The Human Experience*. Iowa: Wm.C. Publisher.
- Geertz, Hildred. 1961. *The Javanese Family*. **New York**: Glencoe Press.
- Heyser, M. (ed.). 1985. *Missing Women: Developing Planning in Asia and The Pasific*. Kuala Lumpur: APPDC.
- Kinnaird, V. and Hall, D (Eds).1994. Understanding Tourism Processes: A . *gender-aware framework*. *Tourism Management Vol. 17(2)*, 95 – 102
- Lama, W.B .1998. CMBT: Women and CBMT in the Himalaya, Submitted to Community-based Mountain Tourism Conference, as posted on the Montain Forum Discussion Archives on 05/08/99. **Available Online: <http://www.mntforum.org/mntforum/archieve/document/discussion98/Cb mt/cbm t4/050898d>**. Diakses tanggal 16/5/11.
- Lestari, Endah Rahayu; Santoso, Imam; dan Sulastri, Rina Dwi. 1997. "Kontribusi Wanita dalam Agribisnis Gula Semut Di Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur", dalam *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Social Sciences)*, Vol. 9 No. 1, Februari. Malang.
- Linberg, K. 2002. *The Economic Impacts of Ecotourism*. **Available On-line: <http://ecotour.csu.edu.au/ecotour/marl.htm>**. Downloaded on 3/25/11.
- Murniati, Nunuk. 2003. *Peranan Perempuan dalam Pembangunan Lestari*. , diakses 27 Desember 2007.
- Niehof, Anke. 1985. *Women and fertility in Madura (Indonesia)*. Doctoral dissertation. Leiden: Instituut voor Culturele Antropologie en Sociologie der Niet-Westerse Volken.
- Sajogyo, P. 1984. *Wanita dan Kerja*. Hasil Penelitian di Pedesaan Jawa dan Beberapa di Luar Jawa. Jakarta: Obor.
- Sarcyaningsih. 1995. *Kemampuan Wanita dalam Pariwisata Konvensi di Batam*. Simposium Nasional Gender dan Pembangunan Pariwisata. 27-28 Maret. Yogyakarta.
- Satyawan, A. dan Utami, T. 2000. Pengembangan Pariwisata dan Pengaruhnya terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Wanita: Studi di Kepulauan Karimun Jawa. *Jurnal Cakra Wisata*, Vol. I(1), 1- 13.

- Sazanami, Hidehiko. 1993, "Cultural Tourism Development Through A Participatory Approach", dalam *Universal Tourism Enriching or Degrading Culture?* Diedit Wiendu Nuryanti. Pp.159-64. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Scheyvens, R. 2000. Promoting Women's Empowerment Through Involvement in Ecotourism: Experiences from the Third World. *Journal of Sustainable Tourism*, Vol. 8(3). Pp. 232 – 249.
- Setyawati, Yuningtyas. 2010. Dampak Aktivitas Pariwisata Terhadap Aktualisasi Diri Perempuan di Pantai Pandansimo, dalam *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. IX, No. 33, September 2010.
- Siswidiyanto, Heru Susilo dan Rahayu, Sri Magesti. 1998. "Pekerjaan Wanita pada Industri Rumah Tangga Sandang dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Rumah Tangga", dalam *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Social Sciences)*, Vol. 10 No. 2, Agustus. Malang.
- Stoler, A. 1977. "Struktur Kelas dan Otonomi Wanita di Pedesaan di Jawa". *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 4, No.1.
- Suarditha, I Ketut R.; Suman, Agus; dan Kusnadi. 2001. "Analisis Pengembangan Sektor Industri Pariwisata Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Pendapatan Rumah Tangga Petani", dalam *Wacana*, Vol. 3 No. 2, Januari. Malang.
- Sunaryo. 1995. *Partisipasi Gender dalam Pembangunan Masyarakat Desa: Pasar Kerja Desa*. Simposium Nasional Gender dan Pembangunan Pariwisata, 27-28 Maret. Yogyakarta.
- Tourism Thailand (2005) Bangkok Post. 18 October 2005.
- Usman, Sunyoto. 1998, "Pengembangan Pariwisata", dalam *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahyuningsih, S. dkk. 1995. *Pola Kerja, Pengambilan Keputusan dan Penikmatan Hasil Kerja di Sektor Pertanian (Suatu Studi Analisis Gender)*. Pusat Studi Wanita. Malang: Universitas Brawijaya.
- Ware, Helen, 1981, *Women, Demography and Development*, Canberra : ANU.
- Wiratha, Ketut. 2002. *Ketidaadilan Gender Yang Dialami Pekerja Perempuan Di Daerah Pariwisata*.
- Wrihantnolo, Randy R. dan Dwidjowijoto. 2007. *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta; Pt Elex Media Komputindo